

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan, prosedur administrasi perjalanan dinas sangat diperlukan dalam penunjang aktivitas operasional perusahaan. Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur mengenai prosedur administrasi kegiatan perjalanan dinas berpedoman pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 yang didalamnya membahas tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap. Sesuai dengan PMK.05/2012 Perjalanan Dinas meliputi Perjalanan Dinas Pindah dan Perjalana Dinas Jabatan sedangkan kegiatan Perjalanan Dinas pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang didalamnya juga terdapat perjalanan dinas paket *Meeting* (rapat/pertemuan).

Dalam mekanisme pembayaran, pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur menerapkan 2 (dua) jenis pembayaran yaitu pembayaran secara UP (Uang Persediaan) dan Pembayaran secara LS (Secara Langsung), dengan 2 (dua) jenis pembayaran tersebut maka prosedur administrasi perjalanan dinas diaplikasikan sesuai dengan jenis pembayaran yang digunakan.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan almanater, diantaranya adalah :

1. Bagi Perusahaan
 - a. Agar sistem pencatatan dokumen surat masuk dan surat keluar dapat teradministratif, perlu adanya buku agenda surat keluar sehingga tidak mengagendakan dokumen surat masuk saja.

- b. Sebaiknya diterapkan prosedur format penulisan pada buku agenda agar penulisan dapat tertata dan tidak berubah - ubah setiap saat.
 - c. Sebaiknya diperlukan adanya prosedur peminjaman dokumen sehingga apabila terjadi kehilangan dokumen dapat dilacak keberadaanya berdasarkan data peminjaman yang tertera di dalam prosedur peminjaman dokumen tersebut.
 - d. Lebih berpacu pada SOP (*Standart Operational Prosedur*) yang telah ditetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi Almamater
- a. Sebaiknya diadakan MOU antara Fakultas Vokasi UNAIR dengan perusahaan sebelum mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan sehingga memudahkan mahasiswa dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan dan dapat mempermudah lulusan Fakultas Vokasi dalam memasuki dunia kerja.
 - b. Perlunya penyetaraan kurikulum akademik dengan penerapan standart operasional yang ada di perusahaan sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang terus berkembang di dunia kerja kedepannya.